

PILOT PROJECT APLIKASI SIMTECHSS DI BABEL, OMBUDSMAN: DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK SUDAH JADI TUNTUTAN

Sabtu, 22 Januari 2022 - Umi Salamah

PANGKALPINANGÂ - PT Riz Tech Internusa terus bergerak maju untuk mengawali pelaksanaan pilot project penggunaan produk sistem informasi dan aplikasi manajemen desa dan kelurahan (Simtechss) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Secara khusus, Direktur PT Riz Tech Internusa, Suhendra berdiskusi secara langsung dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy soal digitalisasi pelayanan publik, Jumat kemarin (21/1).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy menilai digitalisasi pelayanan publik saat ini memang sudah menjadi tuntutan. Pihaknya pun mendukung upaya PT Riz Tech Internusa yang bergerak ke arah tersebut.

Apalagi di pemerintahan tingkat desa dan kelurahan, menurut Yozar, yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik.

"Ya memang kita sudah melihat urgensinya agar ada perbaikan ke depannya. Survei kami di 2021 banyak catatan tentang standar pelayanan publik di desa. Jadi ini moment yang tepat untuk mendorong pelayanan publik lebih baik lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Riz Tech Internusa, Suhendra (akrab disapa Bobo) menegaskan bahwa pihaknya membuat aplikasi tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan itu sendiri.

"Kita berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan pelayanan, juga lebih transparan. Aparatur juga lebih mudah mengaplikasikan manajemen di desa dan kelurahan," ujar Bobo.

alam Simtechss ini, lanjut Bobo terdapat beberapa modul, antara lain: e-report, e-commerce, e-warga, siap des/kel, e-surat, sig-des, e-bps, ATCS, dan punic button. Semua modul tersebut dapat diakses di dalam aplikasi Simtechss secara gratis selama pilot project berlangsung.

"Kita mendapatkan masukan dari Ombudsman, seperti mengenai sistemnya, persyaratan, alur dan biaya serta pelayanan pengaduan, sehingga sistem pelayanan publik, jangan diabaikan," pungkasnya.

Â